

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.81>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Seluruh Provinsi se-Sumatera Tahun Anggaran 2016-2020*. Indonesia: BPK Perwakilan Provinsi.
- Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi: Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juli, V. N., Pendapatan, A., Belanja, D. A. N., & Apba, D. (2010). *Jhon Andra Asmara Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Abstract JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI 2 . STUDY SEBELUMNYA DAN HIPOTESIS PENELITIAN Proses Penyusunan APBA dan Perubahan APBA*.
- Kharisma, B. (n.d.). *DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)*. 9–30.
- Kurnia, R., & Arza, F. I. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 781–794. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.110>

- Mangowal, J. C., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (n.d.). *Kata kunci : pendapatan daerah, belanja modal*. 1(4), 1386–1396.
- Mardiasmo. (2009) *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Praptiningsih & Khoirunnisa, J. (2020). pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD, dan Opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah nusa tenggara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 277–285.
- Prastika, Rizqi Yurice. (2020). Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *Jurnal Idea Hukum*, Vol 6, No 1, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.134>
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.131>
- Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2005). Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- _____. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2015). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*: cetakan keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik

- Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Soleman, M. T., Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2019). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Talaud). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 18–21. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22249.2019>
- Sommaliagustina, D. (2019). *Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah*. 1(1), 44–58.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tingkat, T., Sukarela, P., Perusahaan, P., Yang, M., & Di, T. (2006). *Mandatory Disclosure*). 134.
- Veranti, R. I., Akuntansi, M., Gadjah, U., Ritonga, I. T., Akuntansi, M., Gadjah, U., Perubahan, L., & Arus, L. (2016). *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 1–13.
- Wardani, R. P. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela*.